

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan harapan Desa yang dilakukan oleh aparat Desa dengan masyarakat, memerlukan suatu proses tata kelola keuangan Desa yang baik untuk menciptakan pembangunan yang diharapkan. Planning adalah proses paling utama yang dibutuhkan pemerintah Desa untuk menciptakan Desa yang unggul, pembangunan desa perlu dibentuk oleh dukungan yang baik salah satunya partisipasi. Partisipasi ini adalah suatu bentuk perhatian masyarakat untuk sama-sama membangun harapan yang diinginkan oleh masyarakat, partisipasi ini bisa berbentuk pemanfaatan hasil, pelaksanaan kegiatan, pengawasan ataupun pengambilan keputusan.

Terciptanya Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa merupakan *Start* awal Desa untuk bergerak melaksanakan status wilayah hukumnya karena Desa memiliki pengaruh sangat penting bagi pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat dikatakan layak apabila dapat dilihat dari bentuk pemerintahan yang paling kecil dahulu yaitu Desa, apakah perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh aparat Desa dengan masyarakatnya itu berjalan bergandengan secara terarah atau tidak. Partisipasi masyarakat kepada pembangunan Desa itu sangatlah berpengaruh. Apalagi Kabupaten/Kota yang memberikan dana perimbangan tersebut. Artinya, uang dari masyarakat kembali kepada masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan keuangan secara tertib dan disiplin terhadap asas transparansi, akuntabel dan partisipasi yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, maksudnya dalam mengatur pengelolaan keuangan Desa perlu adanya campur tangan dari masyarakat mulai dari *Planning* sampai ke *Actuating*, karena Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan Desa yang dikelola nantinya harus mampu meningkatkan sarana pelayanan dan juga kegiatan pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakatnya.

Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta di Kabupaten Sumedang adalah objek yang ingin penulis teliti terkait partisipasinya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kertaharja termasuk satu dari 12 Desa di Kecamatan Tanjungkerta yang bersifat agraris dikawasannya, berkebun dan bertani adalah mata pencaharian penduduknya dan sebagian kecil pada sektor perdagangan dan perindustrian bergerak di bidang kerajinan dan memanfaatkan hasil olahan pertanian dan perkebunan. Lebih menarik lagi Desa Kertaharja ini termasuk Desa yang masih berstatus swadaya, artinya Kertaharja memiliki ciri mata pencaharian homogen, penduduknya jarang, bersifat tertutup dan teknologi masih rendah. Padahal Desa ini hanya memiliki jarak $\pm 3,5$ kilometer dari kantor Kecamatan Tanjungkerta. Penulis disini memilih Desa Kertaharja sebagai objek penelitian, karena cukup dekat dengan kantor Kecamatan Tanjungkerta dan juga masih berstatus swadaya.

Terkait Dana Desa di Kertaharja, disebutkan dalam Data APBDesa bahwa pendapatan yang diperoleh Desa Kertaharja tahun 2019 mencapai 1,4 Milliar. Bila dilihat dari rincian di bawah ini:

Tabel 1.1

Pendapatan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2019

| No. | Uraian | Jumlah Pendapatan (Rp) | Presentase (%) |
|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | Pendapatan Asli Desa | 2.400.000 | 1,7 |
| 2. | Dana Desa | 736.643.000 | 52,2 |
| 3. | Alokasi Dana Desa | 477.000.000 | 33,8 |
| 4. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 65.796.000 | 4,6 |
| 5. | Bantuan Keuangan Provinsi | 127.288.000 | 9 |
| Total Pendapatan Desa | | 1.409.323.000 | |

(Sumber: APBDesa Kertaharja tahun 2019, diolah oleh penulis)

Dilihat dari rincian di atas, jelas bahwa Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang ini mendapat beberapa sumber pendapatan desa. Pendapatan yang terbesar yaitu Dana Desa sebesar Rp. 736.643.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari perimbangan keuangan pusat dan daera, sedangkan pendapatan yang terkecil adalah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 2.400.000, dikarenakan belum adanya sumber pendapatan desa yang lain apabila dilihat dari mayoritas masyarakat yang bermata pencaharian petani dan berkebun. Hasil yang didapat ini diharapkan dana sebesar itu bisa dikelola secara akuntabel oleh pemerintah desa, maka dari itu perlu adanya pengawasan terhadap

pengelolaan Dana Desa tersebut. Kegiatan pengawasan di sini tidak dilakukan BPD saja melainkan masyarakat pun dianjurkan, karena mereka yang menjadi penikmat realisasi anggaran tersebut apakah layak dikatakan berhasil atau tidak dan masyarakat juga akan menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah, tergantung seberapa aktif atau seberapa pedulilah mereka dalam membantu pemerintah merealisasikan anggaran dengan terarah.

Tujuan dari dana pendapatan Desa tidak lain sebagai bantuan dana untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa, namun kenyataannya mengandalkan dana desa untuk percepatan pembangunan saja tidak cukup. Dan harus ditunjang dengan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah rincian fisik pembangunan Desa Kertaharja tahun 2019.

Tabel 1.2

**Rincian Dana Pembangunan Fisik Desa Kertaharja Kecamatan
Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2019**

| No. | Jenis Pembangunan | Volume | Biaya (Rp) |
|---------------|---------------------------------|----------|--------------------|
| 1. | Rehab Gedung PAUD | 15 x 5 M | 178.000.000 |
| 2. | Rabat Beton Jalan Desa | 1.024 M | 441.393.000 |
| 3. | Pembangunan TPT Kantor Desa | 50 M | 104.288.000 |
| 4. | Pembangunan RUTILAHU | 1 Unit | 12.500.000 |
| 5. | Pembuatan Penerangan Jalan Umum | 2 Unit | 5.900.000 |
| Jumlah | | | 742.081.000 |

(Sumber: RKP-Desa Kertaharja tahun 2019, diolah oleh penulis)

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik di Desa Kertaharja sebesar Rp. 742.081.000. pembangunan fisik yang terbesar adalah Rabat Beton Jalan Desa,

pembangunan jalan ini di bagi menjadi 4 titik pembangunan yaitu di Dusun Parigi RT 02/04 dan RT 03/04 selanjutnya di Dusun Bojongberod RT 02/02 dan RT 05/02. Untuk Rabat Beton Jalan Desa Dusun Parigi RT 02/04 di anggarkan sebesar Rp. 110.348.400, Rabat Beton Jalan Desa Dusn Parigi Rt 03/04 sebesar Rp. 110.348.400, Rabat Beton Jalan Desa Dusun Bojongberod Rt 05/02 sebesar Rp. 110.348.400, dan Rabat Beton Jalan Desa Dusun Bojongberod Rt 02/02 sebesar Rp. 110.348.400 dengan masing-masing volume jalan sebesar 256 Meter, kemudian. Kemudian pembangunan terbesar kedua adalah Rehab Gedung PAUD yang terletak di Dusun Bojongberod dengan volume 15M x 5M yang di anggarkan sebesar Rp.178.612.700 yang tentunya sasaran utamanya adalah masyarakat Desa Kertaharja, pembangunan terbesar ketiga yaitu Tembok Pertahanan Tanah (TPT) Kantor Desa dengan volume 50 Meter dengan anggaran Rp.104.288.000, kemudian ada pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) dengan volume 1 (satu)Unit dengan anggaran Rp. 12.500.000, dan terakhir ada pembuatan penerangan jalan umum (PJU) dengan volume 2 (dua) unit dengan anggaran sebesar Rp. 5.900.000.

Pembangunan fisik di Desa Kertaharja sudah mulai berjalan setelah pemerintah memberikan bantuan dana untuk desa. Sarana dan prasarana yang dibangun berguna untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pedesaan dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tingkat keterlibatan masyarakat di Desa Kertaharja bisa dikatakan cukup baik. Namun, tingkat partisipasi dalam berkelanjutan pelaksanaan

pembangunan belum terwujud dengan baik. Hal ini dibuktikan dalam pelaksanaan pembangunan babat beton jalan Desa Dusun Bojongberod Desa Kertaharja masih belum terwujud dengan baik. Bila dilihat dari tabel daftar hadir dan tanda terima insentif pekerja di bawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja Pembangunan Jalan
Desa Ruas Dusun Bojongberod RT 02 Rw 02 Tahun 2019

| No. | Nama | Kategori | Jumlah Hari Orang Kerja (HOK) 17-22 Juli 2019 | Jumlah Insentif (Rp) |
|------------------------|----------|----------|--|----------------------|
| 1. | Surya | Tukang | 5 | 500.000 |
| 2. | Anang | Tukang | 5 | 500.000 |
| 3. | Odi | Pekerja | 3 | 240.000 |
| 4. | Tata | Pekerja | 5 | 400.000 |
| 5. | Maman | Pekerja | 5 | 400.000 |
| 6. | Atang | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 7. | Toni | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 8. | Uus | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 9. | Cahya | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 10. | Agus | Pekerja | 5 | 400.000 |
| 11. | Pahri | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 12. | Syahidin | Pekerja | 5 | 400.000 |
| 13. | Rahmat | Pekerja | 1 | 80.000 |
| 14. | Deny | Pekerja | 4 | 320.000 |
| 15. | Yadi | Pekerja | 5 | 400.000 |
| Jumlah Insentif | | | | 5.240.000 |

(Sumber: LPJ Pembangunan Babat Beton Ruas Dusun Bojongberod Program Dana Desa tahun 2019, diolah oleh penulis)

Dilihat dari data tabel 1.4 di atas, dalam Hari Orang Kerja (HOK) yang terhitung dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juli 2019, masih terdapat beberapa pekerja atau tukang yang tidak memanfaatkan anggaran yang ada dan tidak konsisten melaksanakan kerjanya dalam pembangunan babat beton jalan Desa tersebut. Bahkan tidak ada yang mencapai 6 hari kerja, paling besar hanya 5 hari kerja saja. Padahal pemerintah Desa Kertaharja telah menganggarkan

biaya insentif untuk tukang sebesar Rp. 100.000 dan pekerja sebesar Rp. 80.000, nominal insentif tersebut terbilang cukup lumayan besar dalam perharinya. Padahal jalan ruas Dusun Bojongberod tersebut adalah penyambung jalan Dusun Parigi dan Dusun Babakan Ceuri Desa Kertaharja. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih belum berjalan baik dalam keberlanjutannya pembangunan jalan Desa.

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kertaharja memang masih belum terwujud dengan baik, masalah lainnya yaitu mengenai partisipasi yang dibangun oleh aparat Desa dan masyarakatnya. Salah satu masalah yang diperhatikan dalam penelitian ini yaitu pada saat Musrenbang pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang dihadiri Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Bidan Desa, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Kader dan Karang Taruna Desa, mereka hanya mengingatkan dan mengikuti alur penggunaan ADD yang telah direncanakan oleh aparat pemerintahan dan juga penyampaiannya yang mereka lakukan kepada masyarakat terbilang masih belum sepenuhnya paham mengenai alur pengelolaan Dana Desa sehingga hasil keputusan musyawarah tersebut tidak bisa direalisasikan dengan maksimal kepada masyarakat yang nantinya kegiatan membangun Desa mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tidak akan berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan aparat Desa yang mayoritas lulusan SLTP/Sederajat.

Tabel 1.4

Daftar Nama Perangkat Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2024

| No. | Nama | Jabatan | Pendidikan Terakhir |
|-----|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Dudun | Kepala Desa | SLTA/Sederajat |
| 2. | Tatang Taryana | Sekretaris Desa | SLTA/Sederajat |
| 3. | Empu Niawati | Kasi. Pemerintahan | SLTA/Sederajat |
| 4. | Nia Sukmawati | Kasi. Pelayanan | SLTA/Sederajat |
| 5. | Rochmat Tajudin | Kasi. Kesejahteraan | SLTA/Sederajat |
| 6. | Ade S, A. Ma | Kaur. Perencanaan | D-2 |
| 7. | Wati Mida. S. Sos | Kaur. Umum & TU | S-1 |
| 8. | Ujang S | Kaur. Keuangan | SLTP/Sederajat |
| 9. | Udin S, A. Ma | Kepala Dusun I | D-2 |
| 10. | Dedi Supriadi | Kepala Dusun II | SLTA/Sederajat |

(Sumber: Monografi Desa Kertaharja 2018, diolah oleh penulis)

Tabel di atas menunjukkan lulusan pendidikan terakhir paling besar yaitu Sarjana yang berjumlah 1 (satu) orang. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi seseorang dalam penyampaian informasi hasil musyawarah yang telah mereka dapat, karena setiap penyampaian membutuhkan pengetahuan yang lebih luas agar dapat dipahami oleh pendengarnya. Komunikasi tersebut juga dapat menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat yang nantinya masyarakat Desa Kertaharja dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan di Desa, selain daripada itu kurang adanya dukungan peran serta kelompok pemuda dan karang taruna dalam mendukung pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang nantinya dapat meningkatkan rasa kemauan untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah Desa Kertaharja, permasalahan ini termasuk kedalam permasalahan tingkat 2

(dua) yang di alami oleh Desa Kertaharja sebagaimana tercantum dalam RKP Desa Kertaharja tahun 2018.

Permasalahan diatas menunjukkan harus adanya faktor-faktor dan juga upaya yang dapat membangun semangat dalam berpartisipasi. Diantaranya bisa dimulai melalui kesempatan yang diberikan aparat desa kepada masyarakat untuk memulai *Planning*, kesempatan tersebut bisa didapat melalui penggunaan sarana dan prasarana Desa. Desa Kertaharja sudah memiliki aula desa dibelakang kantornya sebagai tempat untuk menjalankan setiap musyawarah kepentingan Desa, dan juga terdapat komputer serta printer yang memudahkan proses administrasi Desa. Disamping adanya kesempatan, harus ada pula kemauan yang dilengkapi dengan kemampuan masyarakat Desa Kertaharja untuk sama-sama bekerja dengan aparat desa membangun harapan Desa.

Dari latar belakang masalah diatas, peneliti akan berusaha memfokuskan perhatiannya terhadap suatu sikap partisipasi dalam diri masyarakat untuk bersama-sama mengelola Dana Desa dengan kemauan, kemampuan dan jalur koordinasi yang ada tentunya supaya dapat berjalan terarah dan akuntabel. Sehingga penulis berencana mengangkat judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA(ADD) DI DESA KERTAHARJA KECAMATAN TANJUNGPURA, KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Tingkat keterlibatan masyarakat Desa Kertaharja cukup baik, tetapi tingkat partisipasi dalam keberlangsungan pelaksanaan pembangunan belum terwujud dengan baik.
2. Terdapat beberapa pekerja pembangunan Jalan Desa Kertaharja yang belum bisa memanfaatkan biaya insentif yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kertaharja untuk bekerja.
3. Belum optimalnya partisipasi yang dibangun oleh aparat Desa dengan Masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kertaharja tahun 2019.
4. Kurangnya peran serta kelompok pemuda dan karang taruna dalam membantu pemerintah Desa Kertaharja menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Kertaharja.

C. Rumusan Masalah

Identifikasi masalah diatas menghasilkan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi hasil dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kertaharja tahun 2019?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

di Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi hasil dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan konsep atau teori-teori pemerintahan khususnya pada partisipasinya masyarakat dalam pengelolaann ADD di Desa Kertaharja.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu tahap akhir kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik dan hasil penelitian juga dapat digunakan oleh Desa Kertaharja sebagai bahan pertimbangan

dan masukan dalam pelaksanaan dan peyelenggaraan ADD, sehingga dapat menjadi monitor bagi pelaksana alokasi dana selanjutnya.

F. Kerangka Pemikiran

Partisipasi tidak hanya merupakan suatu aktifitas namun juga melibatkan jasmani dan rohani seseorang. Partisipasi menciptakan rasa keinginan seseorang individu atau lebih untuk berkontribusi dalam kegiatan bersama yang melahirkan kepedulian terhadap kelompok organisasi/intansi.

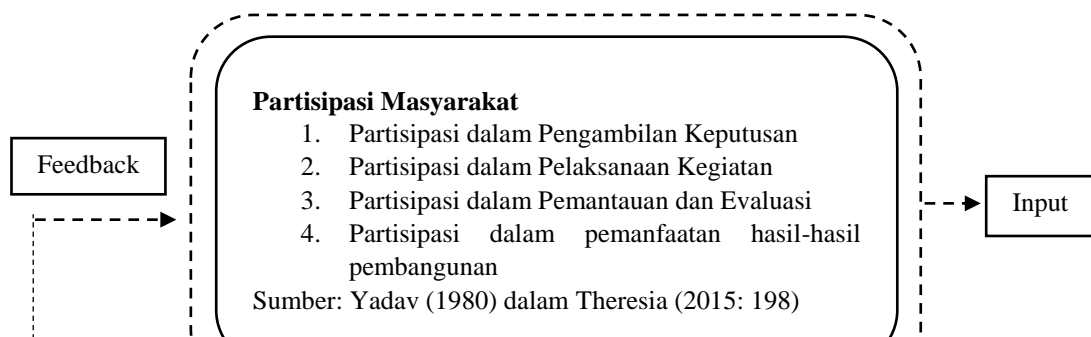
Partisipasi merupakan suatu langkah terpenting dalam keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat pada setiap pengambilan kebijakan negaranya, mengingat bahwa negara ini adalah demokrasi, maka dalam sebuah demokrasi yang kuat partisipasi bukan sekedar mempertahankan kepentingan, melainkan merupakan suatu proses publik yang matang dan tidak mengklaim sesuatu kebenaran melebihi apa yang disetujui secara komensus oleh warga negaranya.

Partisipasi masyarakat terhadap negaranya harus dibangun di mulai dari ruang lingkup pemerintahan yang paling mendasar yaitu Desa, karena Desa sebagai suatu wilayah kesatuan hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Partisipasi bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan pembangunan Desa, kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan gotong royong dalam merealisasikan Dana Desa. Mengingat bahwa Dana yang dicairkan pemerintah lumayan besar, maka asas pengelolaan tersebut harus bersifat terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta partisipatif dengan cara tertib dan disiplin.

Untuk menjaga pengelolaan Dana supaya terarah dan akuntabel, maka diperlukannya suatu sikap keikutsertaan masyarakatnya dalam mengawasi realiasi anggaran tersebut, salah satu kegiatan yang bisa diikuti seperti pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam penelitian ini penulis memakai teori kegiatan partisipasi Yadav (1980) dalam Theresia (2015: 198), yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat bisa bertentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di Desa, karena permasalahan yang peneliti temukan di lapangan terasa cocok dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Yadav tersebut. Sehingga pada akhirnya, keempat macam bentuk partisipasi masyarakat ini dapat membantu menemukan solusi atas permasalahan yang ada ditempat penelitian.

Kaitannya dengan ADD ditempat yang peneliti kaji yaitu Desa Kertaharja. Peneliti ingin mengaitkan keempat bentuk partisipasi itu kepada fenomena disana. Karena pengelolaannya tersebut memerlukan perhatiannya lebih lanjut dari masyarakatnya untuk berperan aktif dalam mengelola Dana di Desanya, karena seringkali masyarakat Desa hanya merasa tau bahwa di Desa tersebut terdapat kegiatan pembangunan, tanpa mengetahui bagaimana proses yang dilakukan sebelum pelaksanaan dan sesudah pelaksanaan Alokasi Dana tersebut. Sehingga kerangka pemikiran yang dibuat dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

A. Proposisi

Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa akan berjalan baik apabila bentuk partisipasi yang dibangun dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan dijalankan dengan baik pula.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG